

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) telah mewujudkan kesepakatan politik nasional yang penting, berperan sebagai instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan setelah diterapkannya otonomi daerah di Indonesia. Indonesia telah menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) secara langsung sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemilihan kepala daerah secara langsung ini merupakan inovasi yang memiliki makna penting bagi proses konsolidasi demokrasi di tingkat lokal.¹

Perkembangan pelaksanaan pemilihan kepala daerah sejak disahkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan pelaksanaan Pemilukada secara langsung pertama kali pada tanggal 1 Juni 2005. Tahun 2008, terjadi perubahan aturan Pemilukada pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, yang awalnya mengatur pemilihan langsung oleh rakyat, menjadi pemilihan oleh DPRD. Perubahan ini menjadi bagian dari kebijakan yang lebih berfokus pada

¹ Muhammad Baharudin Zubakhrum Tjenreng.2020. Demokrasi Di Indonesia Melalui Pilkada Serentak. Depok: Papas Sinar Sinanti, hlm 3-4.

efisiensi politik dan pengurangan potensi konflik sosial. Namun, perubahan ini mendapatkan kritik dan akhirnya digantikan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 yang mengembalikan pemilihan langsung oleh rakyat. Kemudian Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 menyempurnakan mekanisme Pemilukada, termasuk memulai rencana Pemilukada serentak. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur Pemilukada serentak secara nasional, menyempurnakan sistem, dan menjawab tantangan-tantangan baru dalam demokrasi lokal.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sejatinya merupakan bagian penting bagi kehidupan bernegara Indonesia di era Reformasi. Penyelenggaraan Pemilu termasuk Pilkada yang merupakan wujud pelaksanaan sistem demokrasi tidak langsung. Pada sistem demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan, dilaksanakannya Pilkada bertujuan agar Kepala Daerah benar-benar bertindak atas nama rakyat sehingga pemilihannya harus dilakukan sendiri oleh rakyat melalui Pemilu.² Artinya, penyelenggaraan Pilkada untuk memilih Kepala Daerah merupakan mekanisme demokratis agar rakyat dapat menentukan Kepala Daerah yang dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingannya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan pengertian tentang petahana sebagaimana dituangkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

² Kacung, Marijan.2019. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Kencana.Hlm. 37.

Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa “Petahana adalah gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati dan wali kota atau wakil wali kota yang sedang menjabat”.³ Sedangkan petahana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Pemegang suatu jabatan politik tertentu (yang sedang atau masih menjabat). Hak mencalonkan diri bagi petahana terletak pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 menegaskan bahwa setiap warga negara, termasuk petahana berhak mencalonkan diri kembali sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, asalkan memenuhi syarat yang ditetapkan undang- undang.⁴ Pernyataan ini menegaskan bahwa tidak ada larangan bagi petahana untuk kembali mencalonkan diri, selama mereka memenuhi kualifikasi yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu calon yang cenderung dinilai memiliki kekuatan politik yang lebih dibandingkan dengan calon lain adalah calon petahana. Calon petahana cenderung dinilai memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan suara pemilih karena calon petahana telah dikenal sebelumnya oleh masyarakat. Sehingga calon petahana merasa tidak perlu bekerja keras dalam kegiatan kampanye. Hal ini kemudian cenderung membuat calon petahana lengah dalam mempertahankan basis

³ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota. Diakses 29 April 2025. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/173356/peraturan-kpu-no-18-tahun-2019>.

⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang. Diakses 29 April 2025. https://www.mkri.id/public/content/jdih/UU_Nomor_10_Tahun_2016.pdf

pemilih. Keberhasilan maupun kegagalan calon petahana bergantung mereka dalam mempertahankan konstituen atau basis pemilih yang telah diperoleh pada periode sebelumnya.⁵

Berbicara mengenai petahana yang kembali bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah, maka banyak terlintas dalam pikiran orang-orang yaitu kemenangan kembali yang diraih oleh petahana. Hal ini disebabkan karena posisi petahana memiliki banyak peluang. Petahana memiliki relasi yang cukup luas, baik dengan masyarakat, birokrasi yang dipimpin, pemuka adat, tokoh-tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan lainnya. Dalam masa kampanye, petahana tidak perlu mengenalkan diri mereka kepada masyarakat, karena sudah dikenal luas oleh masyarakat. Keuntungan yang didapatkan oleh petahana diperoleh pada masa kepemimpinan sebelumnya yang dimanfaatkan sebagai wadah untuk menjaring dan memobilisasi suara yang membantu kemenangan dalam pemilihan berikutnya.

Terdapat penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitian ini mengenai kekalahan petahana. Penelitian tersebut adalah penelitian yang dilakukan Fathan Hawali Putra Tahun 2023 dengan judul “Faktor-Faktor Kekalahan Petahana Hendrajoni dalam Pilkada Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020”.⁶ Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Tika April Lasmi Tahun 2019 dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Kekalahan Pasangan Petahana (Ali Yusuf-Ismed) Pada

⁵ Nurfadillah N. Dwi R M, Dewi N.2022. strategi Incumbent dalam Pemenangan Pemilihan Legislatif 2019 di Kabupaten Maros. *Jurnal Ilmu Sosial dan Sosial Politik*. Vol 5 No.2. Hlm.193-202.

⁶Fathan, Hawali Putra. 2023.Faktor-Faktor Kekalahan Petahana Hendrajoni Pada Pilkada Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020. Skripsi. Universitas Andalas.

Pemilihan Kepala Daerah Kota Sawahlunto tahun 2018”.⁷ Penelitian terdahulu selanjutnya oleh Muhammad Ghaly Fairuz Riadi, Koalisi dan Modalitas (Analisis Kekalahan Pradi Supriatna- Afifah Alia Dalam Pilkada Kota Depok 2020)”.⁸ Dari beberapa penelitian terdahulu mengkaji mengenai bagaimana kekalahan petahana dalam fokus marketing politiknya dan modal sosial .

Pada kontestasi Pilkada petahana mempunyai keunggulan maju pada Pilkada karena petahana memiliki banyak peluang dalam mendapatkan kemenangan. Akan tetapi petahana pada Pilkada Kota Padang tahun 2024 mengalami kekalahan padahal petahana memiliki *track record* yang baik selama menjabat sebagai Walikota Padang. Oleh sebab itu, peneliti ingin menganalisis penyebab kekalahan petahana sebagai kepala daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, Provinsi Sumatera Barat menggelar pemilihan di 20 daerah, yang terdiri dari 1 provinsi, 12 kabupaten, dan 7 kota. Di antara kota-kota tersebut, tujuh di antaranya melaksanakan pemilihan pada tanggal 27 November 2024, yaitu Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, dan Kota Solok. Dari 7 kota yang melaksanakan pemilihan calon

⁷Tika, April Lasmi. 2019. Analisis Faktor-Faktor Kekalahan Pasangan Petahana (Ali Yusuf-Ismed) Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Sawahlunto Tahun 2018. Skripsi, Universitas Andalas.

⁸Riadi, Muhammad Ghaly Fairuz. 2022. Koalisi Dan Modalitas (Analisis Kekalahan Pradi Supriatmaafifah Alia Dalam Pilkada Kota Depok 2020). Skripsi. Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

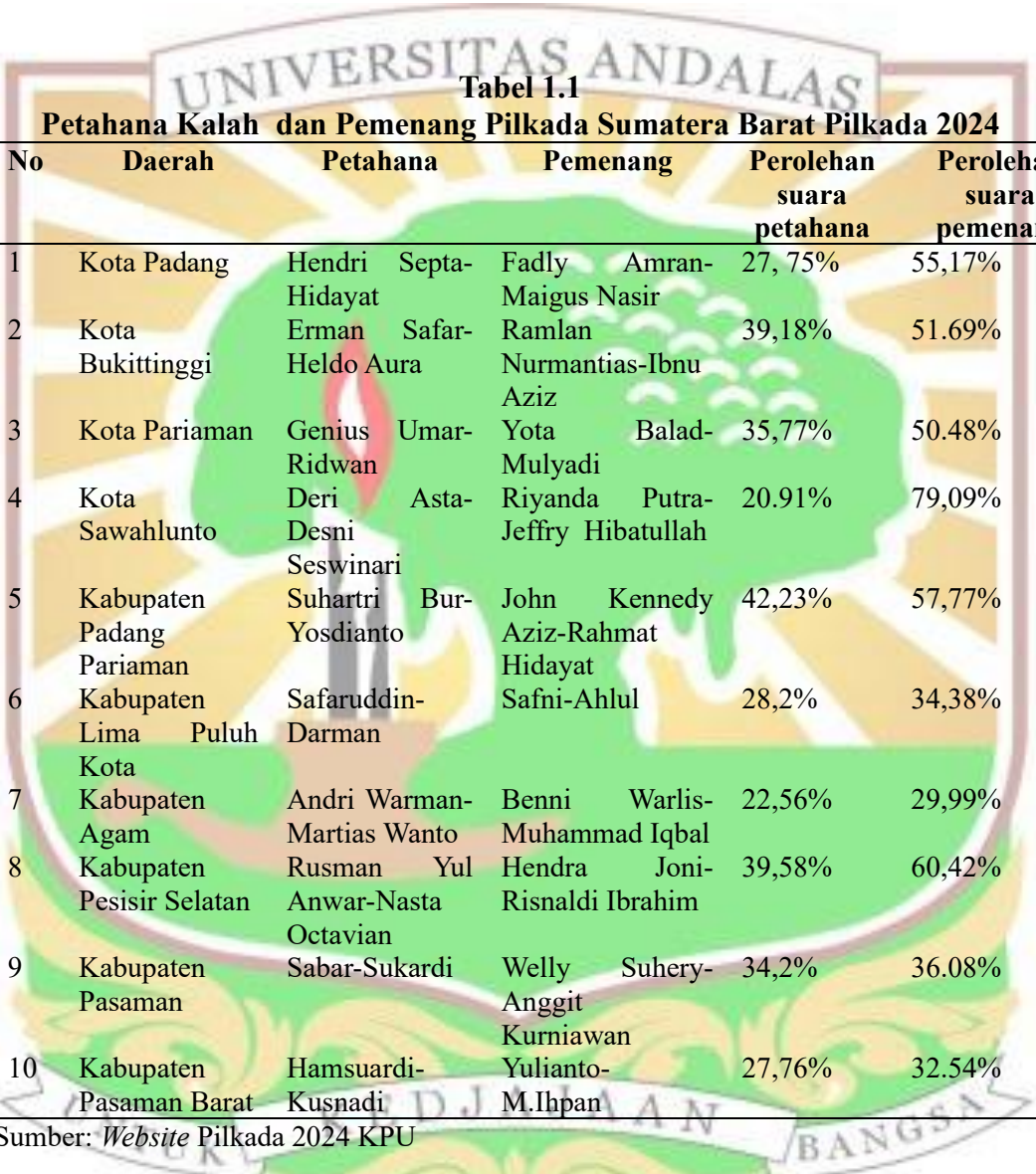
Walikota dan wakil Walikota hanya petahana dari Kota Solok yang memenangkan kontestasi tersebut.⁹

Melihat dinamika Pemilihan Kepala Daerah 2024, banyak petahana yang gagal mempertahankan jabatannya, padahal ketika membicarakan petahana yang kembali mencalonkan diri, sering kali muncul anggapan bahwa kemenangan kembali diraih oleh mereka. Posisi petahana memang memiliki sejumlah keunggulan dan peluang yang besar dalam kontestasi ini. Petahana memiliki relasi yang cukup luas, yaitu dengan masyarakat, birokrasi pemerintahan, pemuka adat, tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan sebagainya. Pada masa kampanye, petahana tidak lagi perlu memperkenalkan diri kepada masyarakat, karena mereka sudah dikenal luas oleh publik. Masa kepemimpinan sebelumnya dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menjaring dan memobilisasi suara yang berkontribusi pada kemenangan petahana dalam pemilihan berikutnya.

Fenomena pada Pilkada tahun 2024 di Sumatera Barat banyaknya petahana yang kalah. Lazimnya petahana memiliki peluang yang besar untuk terpilih kembali, namun hal tersebut tidak berlaku di Sumatera Barat. Kinerja selama masa jabatan yang menjadi salah satu alasan utama mengapa masyarakat memberikan kepercayaan mereka kembali. Adapun 10 kota dan kabupaten petahana yang kalah dalam Pilkada Sumatera Barat tahun 2024 dan pemenang pada Pilkada 2024.¹⁰

⁹ Muhammad Iqbal.2022, Januari 25. Catat! Pemilu 2024 Digelar 14 Februari, Pilkada 27 November.CNBCIndonesia.<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220125134125-4-310262/catat-pemilu-2024-digelar-14-februari-pilkada-27-november> diakses pada 17 Desember 2024.

¹⁰ Hanafi.2024, Desember 8. Daftar Petahana Tumbang di Sumbar Pada Pilkada 2024, Ada Yang Hanya dapat 20,91 persen. AyoBandung. <https://www.ayobandung.com/umum/7914108466/daftar->



Tabel 1.1
Petahana Kalah dan Pemenang Pilkada Sumatera Barat Pilkada 2024

No	Daerah	Petahana	Pemenang	Perolehan suara petahana	Perolehan suara pemenang
1	Kota Padang	Hendri Septa-Hidayat	Fadly Amran-Maigus Nasir	27,75%	55,17%
2	Kota Bukittinggi	Erman Safar-Heldo Aura	Ramlan Nurmantias-Ibnu Aziz	39,18%	51,69%
3	Kota Pariaman	Genius Umar-Ridwan	Yota Balad-Mulyadi	35,77%	50,48%
4	Kota Sawahlunto	Deri Asta-Desni	Riyanda Putra-Jeffry Hibatullah	20,91%	79,09%
5	Kabupaten Padang Pariaman	Seswinari Suhartri Bur-Yosdianto	John Kennedy Aziz-Rahmat Hidayat	42,23%	57,77%
6	Kabupaten Lima Puluh Kota	Safaruddin-Darman	Safni-Ahlul	28,2%	34,38%
7	Kabupaten Agam	Andri Warman-Martias Wanto	Benni Warlis-Muhammad Iqbal	22,56%	29,99%
8	Kabupaten Pesisir Selatan	Rusman Yul Anwar-Nasta Octavian	Hendra Joni-Risnaldi Ibrahim	39,58%	60,42%
9	Kabupaten Pasaman	Sabar-Sukardi	Welly Suhery-Anggit Kurniawan	34,2%	36,08%
10	Kabupaten Pasaman Barat	Hamsuardi-Kusnadi	Yulianto-M.Ihpan	27,76%	32,54%

Sumber: *Website* Pilkada 2024 KPU

Pada Pemilihan Umum Wali Kota Padang 2024, terdapat tiga pasangan calon yang maju. Pasangan nomor urut 1, Fadly Amran-Maigus Nasir, didukung oleh Partai Nasdem, Golkar, PKB, PDI-P, PPP, dan Partai Ummat. Pasangan nomor

urut 2, Muhammad Iqbal-Amasrul, diusung oleh Partai PKS dan Partai Demokrat. Sementara itu petahana Hendri Septa-Hidayat, yang berada di nomor urut 3, didukung oleh Partai PAN dan Partai Gerindra.



Tabel 1.2
Pemilihan Umum Wali Kota Padang 2024

no	Kandidat	Partai Pengusung	Total Suara	Persentase
1	Fadly Amran–Maigus Nasir	Nasdem, Golkar, PKS, PDI-P, PPP, Ummat	176.648	55,17%
2	Muhammad Iqbal–Amasrul	PKS, Demokrat	54.685	17,08%
3	Hendri Septa-Hidayat	PAN dan Gerindra	88.859	27,75%

Sumber: *Website KPU Kota Padang Tahun 2024*

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang, Sumatera Barat, menetapkan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang 2024, nomor urut 1, Fadly Amran dan Maigus Nasir, sebagai pemenang pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Padang 2024. Penetapan ini diumumkan dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada Kota Padang 2024 yang dilaksanakan di Truntum Hotel Padang pada Jumat, 6 Desember 2024. Fadly Amran dan Maigus Nasir berhasil meraih 176.648 suara, sementara pasangan calon lainnya memperoleh suara sebagai: nomor urut 2, Muhammad Iqbal-Amasrul, dengan 54.685 suara, dan nomor urut 3 Hendri Septa-Hidayat, dengan 88.859 suara. ¹¹

¹¹ Tommy Adi. 2024. Celah Sumbar. KPU Padang Tetapkan Fadly Amran-Maigus Nasir Pemenang Pilwalkot Padang 2024. <https://sumbar.pikiran-rakyat.com/politik/pr-3158851523/kpu-padang-tetapkan-fadly-amran-maigus-nasir-pemenang-pilwalkot-padang-2024?page=all>. Diakses 17 Desember 2024.

Pasangan Hendri Septa-Hidayat dinilai memiliki peluang besar pada Pilkada Kota Padang tahun 2024 karena keduanya lebih dulu dalam mendeklarasikan pencalonan dan telah mendapatkan dukungan dari partai PAN dan Gerindra. Selain itu Hendri Septa sebagai petahana sudah dikenal baik oleh masyarakat Kota Padang. Hal ini disampaikan oleh Otong Rosadi selaku Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara menurutnya pasangan ini patut diperhitungkan. *Incumbent* itu menang di awal, karena popularitasnya sebagai walikota di atas rata-rata calon lainnya dan juga menurutnya pencapaian Hendri Septa ketika memimpin Kota Padang tidak perlu diragukan lagi. Otong Rosadi juga menyebut Hendri Septa memiliki modal sosial politik, karena keluarganya politisi berasal dari Kota Padang.¹²

Selama menjabat sebagai Walikota Padang, Hendri Septa mendapat beberapa penghargaan yaitu: (1) Pemerintah Kota Padang meraih Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dengan kategori Perencanaan dan Pencapaian Daerah Tingkat Kota 2021 Terbaik II dari Kementerian Pembangunan Perencanaan Nasional (PPN)/ Bappenas, 4 Mei 2021;¹³ (2) Penghargaan implementasi program smart city kategori smart society gerakan menuju smart city dari Kemenkominfo RI;¹⁴ (3) Penghargaan predikat kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2022 dari

¹² Imel. 2024. Binews.id. <https://binews.id/berita/18048/hendri-septa--hidayat-punya-peluang-lebih-besar.html>. Diakses 24 Februari 2025.

¹³ SigapNewsSumbar. 2021. Kota Padang Raih Penghargaan Terbaik II Perencanaan Pembangunan Kota se-Indonesia. <https://sumbar.sigapnews.co.id/padang/sn-27387/kota-padang-raih-penghargaan-terbaik-ii-perencanaan-pembangunan-kota-se-indonesia>. Diakses 24 Februari 2025.

¹⁴ Padang.go.id. 2022. Walikota Padang Menerima Penghargaan Smart City Kategori Smart Society dari Menteri Komunikasi dan Informatika. <https://padang.go.id/wali-kota-padang-menerima-penghargaan-smart-city-kategori-smart-society-dari-menteri-komunikasi-dan-informatika>. Diakses 24 Februari 2025.

Ombudsman RI;¹⁵ (4) Innovative Government Award (IGA Award) 2023 dari Kementrian Dalam Negeri RI; (5) Penghargaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.¹⁶

Hendri Septa merupakan calon Wali Kota Padang yang merupakan petahana sementara Hidayat yang pernah menjabat sebagai legislator atau anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Hidayat pernah menjabat sebagai anggota DPRD Sumbar dua pada periode dari 2014-2024. Ia menjabat sebagai Ketua Fraksi Gerindra Sumbar DPRD Sumbar, selama menjabat sebagai anggota Komisi IV DPRD Sumbar tahun 2014, Wakil Ketua Badan Legislasi daerah 2014-2017, Ketua Komisi V Bidang Kesejahteraan Rakyat 2017-2019, dan ketua Bapemperda 2019-2021. Berkiprah dengan Partai Gerindra, Hidayat pernah menjabat sebagai Ketua DPC Gerindra Kabupaten Sijunjung pada tahun 2011-2012, Wakil Sekretaris DPD Gerindra Sumbar 2012-2017 dan Wakil Ketua DPD Gerindra Sumbar 2018-hingga sekarang. Hidayat juga Kader Gerindra bersertifikat Diklat Hambalang pada 2019.¹⁷

Dari rekam jejaknya, Hidayat menunjukkan profil sebagai politisi yang memiliki pengalaman luas dalam legislasi dan serta kepemimpinan partai.

¹⁵ Adril MY. 2023. Infosumbar. Walikota Padang Hendri Septa Terima Penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik tahun 2022 dari Ombudsman RI. <https://infosumbar.net/berita/berita-sumbar/padang/wali-kota-padang-hendri-septa-terima-penghargaan-predikat-kepatuhan-standar-pelayanan-publik-tahun-2022-dari-ombudsman-ri/>. Diakses 24 Februari 2025.

¹⁶ Analisisini.id. 2023. Berkinerja Terbaik, Wako Hendri Septa Raih Penghargaan SPM Award 2023. <https://www.analisakini.id/2023/03/berkinerja-terbaik-wako-hendri-septa.html>. Diakses 24 Februari 2025.

¹⁷ Rima Kurniati. 2024. TribunPadang. Profil Hidayat, Eks Legislator Sumbar Bakal Calon Wakil Wali Kota Padang. <https://padang.tribunnews.com/2024/09/04/profil-hidayat-eks-legislator-sumbar-bakal-calon-wakil-wali-kota-padang?page=2>. Diakses 24 Februari 2025.

Perjalanan dari tingkat daerah hingga provinsi serta keterlibatan strategis, yang mencerminkan kapasitasnya dalam mengelola dinamika politik di Sumatera Barat. Sertifikasi Diklat Hambalang juga mengindikasikan kedekatannya dengan struktur kepemimpinan nasional Partai Gerindra, yang dapat menjadi modal politik kuat. Hendri Septa menjabat sebagai Walikota Padang periode 2019-2024 dan kembali mencalonkan diri sebagai petahana pada Pilkada Kota Padang 2024 Hendri Septa mengajukan diri untuk periode kedua¹⁸ dan juga memperoleh surat rekomendasi dari Partai Amanat Nasional (PAN), partai pengusungnya.¹⁹ Statusnya sebagai petahana memperkuat posisi dalam kontestasi pemilihan, mengandalkan rekam jejak pemerintahan selama lima tahun terakhir. Selama Hendri Septa menjadi Walikota Padang (2021-2024), capaian kinerja makro Kota Padang meningkat. Capaian tersebut dihasilkan karena keberhasilan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Padang berkolaborasi dengan swasta dan pihak terkait lainnya yang berkontribusi ke pembangunan ini.

Adapun bentuk dari pencapaian yang diraih oleh Hendri Septa selama menjabat sebagai Walikota Padang²⁰: (1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), IPM Kota Padang tahun 2021 adalah 82,90 persen. Pada tahun 2022 naik menjadi 83,29 persen dan kembali naik pada tahun 2023 menjadi 83,98 persen; (2) Pendidikan,

¹⁸ Rahmadhani, Reni Susanti. 2023. Kompas.com. Klaim Didukung Rakyat, Wali Kota Padang Hendri Septa Maju Pilkada 2024. <https://regional.kompas.com/read/2023/03/06/164426078/klaim-didukung-rakyat-wali-kota-padang-hendri-septa-maju-pilkada-2024>. Diakses 15 Maret 2025.

¹⁹ Habil Ramanda. 2024. Sumbarkita. Terima Rekomendasi PAN, Hendri Septa Nyatakan Kembali Maju Pemilihan Wali Kota Padang 2024. <https://sumbarkita.id/terima-rekomendasi-pan-hendri-septa-nyatakan-kembali-maju-pemilihan-wali-kota-padang-2024/>. Diakses 15 Maret 2025.

²⁰ Sinyalgonews.com. 2024. Hasil Kerja Hendri Septa Selama Memimpin Kota Padang (2019-2024). <https://sinyalgonews.com/hasil-kerja-hendri-septa-selama-memimpin-kota-padang-2019-2024/>. Diakses 15 Maret 2025.

pada tahun 2022 berada pada angka 16,54 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 16,56 persen; (3) Kesehatan, Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Kota Padang terjadi peningkatan dari 73,71 persen di tahun 2022 menjadi 74,94 pada tahun 2023; (4) Jumlah penduduk miskin, kemiskinan tahun 2023 di Kota Padang 4,17 persen. Angka tersebut turun dari tahun 2022 yakni 4,26 persen dan 4,94 persen pada tahun 2021; (5) Padang Kota Layak Huni, Tahun 2023 index livability rata-rata Kota Padang 68,28 persen. Nilai indeks ini meningkat dari tahun 2022 yang berada pada angka 68,20 persen; (6) Penataan moda angkutan umum, beroperasinya Trans-Padang yang melayani 6 koridor Kota Padang; (7) Peningkatan kualitas lingkungan hidup/ Padang Bagoro. Program yang dijalankan dengan konsepsi meningkatkan kualitas kebersihan kota seperti Padang Bergoro, pengerukan dan pembersihan Batang Arau. Kesuksesan ini dimuat dalam majalah Tempo;²¹ (8) Pembangunan taman tematik, sebanyak 14 taman kota yang telah dibangun di Kota Padang; (9) Capaian kinerja makro, selama tahun 2021-2023 menunjukkan hasil baik, pertumbuhan ekonomi Kota Padang mengalami peningkatan cukup signifikan 3,65 persen di tahun 2021 dan naik menjadi 4,31 persen di tahun 2022 dan naik lagi menjadi 4,54 persen di tahun 2023; (10) Ketersediaan Rumah Bersubsidi, program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dijalankan sejak tahun 2019. Pada tahun 2023 berhasil memfasilitasi penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 6.503 unit rumah; (10) Hendri Septa juga berhasil menyelesaikan pembangunan

²¹ Tempo.com. 2024. Padang Bagoro, Memulai Bersih dari Keluarga. <https://www.tempo.co/info-tempo/padang-bagoro-memulai-bersih-dari-keluarga-27360>. Diakses 15 Maret 2025.

Pasar Raya Padang fase VII yang dijadwalkan selesai pada penghujung tahun 2024. Berbagai pencapaian lainnya juga diperoleh selama masa jabatannya sebagai Wali Kota Padang.²²

Walaupun banyak penghargaan yang telah diraih oleh Hendri Septa pada masa kepemimpinannya tetapi kepemimpinan tersebut belum menunjukkan keberhasilan sebab kepemimpinan tersebut ditunjukkan dari adanya banyak penggusuran pelaku usaha dan UMKM yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang melalui Satpol PP, yang mencerminkan pendekatan yang tidak berpihak kepada ekonomi kerakyatan. Selain itu selama kurang lebih dari 2 tahun memimpin Kota Padang Hendri Septa tidak didampingi oleh Wakil Walikota akibat tarik ulur kepentingan politik antara partai koalisi. Ketiadaan pendamping dalam memimpin kota menunjukkan lemahnya konsolidasi politik dan ketidaksiapan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang solid kepemimpinan di tingkat kota seharusnya bersifat kolektif dan kolaboratif, sehingga keputusan yang diambil secara terarah dan terukur. Namun fakta bahwa Hendri Septa secara sendiri memimpin tanpa kehadiran wakil yang seimbang justru memperlihatkan kecenderungan kepemimpinan yang dipaksakan dan tidak berorientasi pada efektivitas pemerintahan. Ketidakharmonisan dalam kepemimpinan mencerminkan kepada kelemahan manajemen politik yang dimiliki oleh kandidat.²³

²² Sumbarsatu.com. 2024. Ini Bukti Konkret Kerja Nyata Hendri Septa Semasa Wali Kota Padang. <https://sumbarsatu.com/berita/32082-ini-bukti-konkret-kerja-nyata-hendri-septa-semasa-wali-kota-padang>. Diakses 15 Maret 2025.

²³ M.Rafi Ariansyah,. et al.2024. Faktor-Faktor Kekalahan Petahana dalam Kontestasi Pilkada 2024 di Kota Padang.*Jurnal Kajian Sosial Humaniora*. Hlm105.

Petahana yang hanya mengandalkan *track record* dan jaringan politik yang sudah terbangun. Berdasarkan data yang diperoleh dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI), kepala daerah yang masih memerintah (petahana) memiliki peluang yang cukup besar untuk kembali memenangkan Pemilu. Peluang untuk terpilih kembali dalam pelaksanaan Pemilu oleh calon kepala daerah petahana diperoleh melalui keuntungan langsung dan tidak langsung. Keuntungan langsung diperoleh kepala daerah yang masih menjabat adalah dalam popularitas, kepala daerah sudah dikenal oleh masyarakat pemilih. Sedangkan, keuntungan tidak langsung adalah aktivitas dari kepala daerah sebagai calon petahana. Aktivitas seperti penyerahan bantuan, kunjungan ke daerah, mengenalkan diri di acara kemasyarakatan atau perayaan hari besar agama bisa digunakan sebagai media untuk lebih mendekatkan dan mengenalkan diri kepada masyarakat.²⁴

Hendri Septa sebagai petahana telah menjalin koalisi antara PAN dan Gerindra. Gerindra memiliki 7 kursi di DPRD Kota Padang, sedangkan PAN memiliki 5 kursi, sehingga total dukungan memenuhi syarat minimum.²⁵ Hidayat, wakil Hendri Septa, merupakan anggota DPRD Sumatera Barat selama dua periode, sementara Hendri Septa menjabat sebagai Ketua DPD PAN Kota Padang. Kolaborasi Hendri Septa dari PAN dan Hidayat dari Partai Gerindra menjadikan dukungan partai politik sebagai salah satu peluang kemenangan calon, terutama apabila partai tersebut memiliki citra positif di mata publik. Pasangan calon yang didukung oleh

²⁴ Doddy Setiawan, Eka Setyorini. 2018. Dampak pemilihan kepala daerah terhadap alokasi belanja daerah. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*. 2 (2). 106-119.

²⁵ Rahmadhani, Reni Susanti. 2024. Kompas.com. PAN dan Gerindra Berkoalisi di Pilkada Padang 2024, Dukung Hendri Septa-Hidayat. <https://regional.kompas.com/read/2024/07/02/205517278/pan-dan-gerindra-berkoalisi-di-pilkada-padang-2024-dukung-hendri-septa>. Diakses 15 Maret 2025.

partai politik yang kuat memiliki keunggulan dalam memperoleh dukungan yang lebih luas, sehingga memperbesar peluang untuk meraih kemenangan dalam Pilkada.

Di sisi lain, pasangan Fadly Amran-Maigus Nasir memiliki keunggulan dukungan dari enam partai politik yaitu Partai Nasdem, PPP, Golkar, PKB, PDI-P, dan Partai Ummat, yang secara keseluruhan memiliki 22 kursi di DPRD Kota Padang. Meski Hendri Septa-Hidayat hanya didukung oleh dua partai politik, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Gerindra. Meski demikian, jika merujuk pada Pemilu DPR 2019, PAN dan Gerindra merupakan dua partai politik dengan perolehan suara terbanyak di Provinsi Sumatera Barat, sehingga tetap memiliki pengaruh politik yang signifikan di tingkat daerah.²⁶ Koalisi kecil membatasi akses ke basis massa yang beragam. Meski Pilkada bersifat lokal dan dari partai politik memiliki pengaruh, dukungan multipartai dimiliki oleh Fadly-Maigus lebih efektif menjangkau segmen pemilih berbeda, misalnya petani, buruh, UMKM, dll.

Ketimpangan koalisi dan dukungan partai yang dimiliki Hendri Septa-Hidayat yang di mana Hendri Septa-Hidayat terdiri dari dua partai sedangkan Fadly Amran-Maigus Nasir terdiri 6 partai. Ketimpangan menciptakan perbedaan yang signifikan dari sumber daya kampanye, jangkauan organisasi dan mobilisasi massa. Banyak koalisi memberikan dampak positif dari segi finansial, penggalangan dana masif untuk aktivitas kampanye, memungkinkan jangkauan lebih luas, legitimasi politik dari lintas ideologi. Petahana hanya yang mengandalkan *track record* dan

²⁶ Asrinaldi A, "Menakar Kekuatan Calon Wali Kota Padang," *Langgam.id*, n.d.

jaringan politik sudah terbangun. Karena mengandalkan *track record* tersebut petahana berarti petahana menunjukkan indikasi adanya evaluasi yang tidak baik dari kinerja selama menjabat.

Posisi Hendri Septa sebagai petahana menekankan pada kontinuitas yang ternyata tidak resonan dengan aspirasi masyarakat padang yang menginginkan perubahan. Kegagalan dalam melakukan *branding* sebagai sosok pemimpin yang membawa perubahan menjadi kelemahan dasar dalam kampanyenya. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara citra yang dibangun oleh kandidat dengan ekspektasi pemilih, yang ada pada akhirnya berdampak pada melemahnya daya tarik politik di mata publik. Menyinggung soal visi yang ditawarkan oleh Hendri Septa-Hidayat yang menekankan pada kontinuitas. Hendri Septa-Hidayat mengusung visi “Kota Padang Metropolitan Maju dan Berkelanjutan” dengan penekanan pada kelanjutan program infrastruktur dan tata kelola pemerintahan dari periode sebelumnya. Visi ini mencerminkan komitmen untuk mempertahankan arah pembangunan yang telah dirintis sejak 2021.²⁷

Pelaksanaan Pilkada Kota Padang tahun 2024, Hendri Septa yang berpasangan dengan Hidayat dinilai terlalu percaya diri sebagai petahana karena bisa menenangkan kontestasi pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang. Pasangan ini kurang mengukur sejauh mana masyarakat puas atas kepemimpinannya, karena merujuk pada SBLF Myriset Consultant merilis hasil

²⁷ Rima Kurniati.2025.TribunPadang.com.Visi Misi dan Program Hendri Septa-Hidayat, Janjikan Kota Padang Metropolitan Maju dan Berkelanjutan <https://padang.tribunnews.com/2024/09/18/visi-misi-dan-program-hendri-septa-hidayat-janjikan-kota-padang-metropolitan-maju-dan-berkelanjutan> .Diakses 8 Juni 2025.

survei yang menunjukkan kepemimpinan Mahyeldi sebagai Walikota Padang lebih baik daripada Hendri Septa. Dalam survei tersebut Mahyeldi mendapatkan 77,13 persen, sedangkan Hendri Septa hanya mencapai 22,88 persen. Survei ini dilakukan dengan 800 sampel respons pada tanggal 10-13 Juli 2024 dengan Margin of Error (Moe) sebesar 3 persen.²⁸ Hasil evaluasi terhadap pemerintahan Kota Padang yang dilakukan oleh lembaga survei Spektrum Politika bahwa persentase alasan tidak puas dengan kinerja Hendri Septa sebagai Walikota Padang karena kinerja kurang dengan persentase 30,66 persen, Gaya kepemimpinan 19,77 persen, dan ekonomi masyarakat 10 persen untuk tiga teratas hasil dari evaluasi pemerintah Kota Padang pada saat Hendri Septa menjabat sebagai Wali Kota Padang²⁹. Kinerja Hendri Septa yang dinilai buruk oleh sebagian besar masyarakat menjadi tergerusnya kepercayaan publik. Masyarakat yang tidak puas memilih calon baru yang menawarkan perubahan dan solusi.

Pasangan Fadly Amran-Maigus Nassir mengangkat isu kampanye mengenai ekonomi dan melakukan kampanye 10-15 titik sehari. Janji kampanye oposisi terkait ekonomi ini berkaitan dengan permasalahan di Kota Padang 5 tahun terakhir terkait pengangguran cukup tinggi, berdasarkan data BPS Kota Padang tahun 2024 ditemukan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Padang tahun 2024 adalah 9,88 persen. Angka ini tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Pasaman Barat berada di posisi kedua dengan angka 6,34 persen dan Kabupaten

²⁸ Henda Efison. 2024. Padek Jawapos. Mahyeldi Lebih Baik Dibanding Hendri Septa Saat Pimpin Padang. <https://padek.jawapos.com/padang/2364974314/mahyeldi-lebih-baik-dibanding-hendri-septa-saat-pimpin-padang>. Diakses 13 Juni 2025.

²⁹ Spektrum Politika, Evaluasi Terhadap Pemerintahan kinerja Hendri Septa sebagai Walikota Padang.

Dharmasraya di posisi ketiga dengan angka 6,02 persen. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) ini membuktikan bahwa ketidaksesuaian Walikota Padang dalam mengurangi angka pengangguran dan menciptakan lapangan kerja pada generasi muda usia produktif, ini menjadi tolak ukur bagi sebuah kegagalan kepemimpinan bagi suatu daerah.³⁰ Salah satu misi yang ditawarkan oleh Fadly Amran dan Maigus Nassir adalah “Mendorong Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan” dari misi ini sudah menjelaskan bahwa Fadly Amran-Maigus Nassir membawa isu ekonomi dalam menjawab permasalahan pengangguran sedangkan dari Hendri Septa-Hidayat lebih menekankan pada berkelanjutan.

Penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa keberadaan petahana dalam kontestasi Pilkada tidak selalu memberikan keuntungan elektoral. Dalam konteks Pilkada Kota Padang 2024, posisi petahana justru menjadi beban politik akibat kejenuhan publik terhadap kepemimpinan sama dan melemahnya dukungan dari partai politik. Meskipun petahana memiliki rekam jejak positif secara administratif dan memperoleh berbagai penghargaan selama masa jabatan, hal tersebut tidak lagi menjadi faktor utama yang memengaruhi pilihan pemilih. Fenomena ini menunjukkan adanya kerugian petahana, di mana kekuasaan yang lama berpotensi menurunkan dukungan elektoral karena masyarakat menginginkan perubahan dan pembaruan kepemimpinan.

Meskipun demikian, berdasarkan sejumlah asumsi penelitian dan pandangan yang diperoleh dari berbagai data yang ada terdapat beberapa hal yang

³⁰ M. Rafi Ariansyah et al. Opcit. Hlm 106-107.

diduga menjadi penyebab kekalahan pasangan petahana Hendri Septa-Hidayat dalam Pilkada Kota Padang 2024. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penyebab kekalahan petahana Hendri Septa-Hidayat pada Pilkada Kota Padang tahun 2024 ?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ditemukan maka peneliti melakukan penelitian dengan tujuan mendeskripsikan penyebab kekalahan petahana Hendri Septa-Hidayat pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang Tahun 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu di antaranya sebagai berikut:

1.4.1 Secara Akademis

Penelitian ini secara akademis mampu menjelaskan mengenai penyebab kekalahan petahana Hendri Septa -Hidayat pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang 2024. Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi akademisi dalam mengkaji politik lokal di Indonesia, terutama mengenai kekalahan petahana dalam pemilu daerah.

1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini menjadi bahan bagi calon kandidat, tim sukses dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah dan bagi petahana Hendri Septa -Hidayat jika ingin mencalonkan kembali pada pemilihan berikutnya.